

Sabtu, 8 Oktober 2011



KRISANTUS KURNIAWAN

FOTO: DOK

### Pontianak, BERKAT.

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Krisantus Kurniawan, S.Ip menyayangkan demo yang dilakukan Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) yang diduga tak ada etika di Gedung DPRD Kalbar, belum lama ini.

Hal ini dikatakan Krisantus terkait spanduk yang dibawa oleh mahasiswa sekitar dua puluhan orang tersebut yang mengatakan "Gubernur Zinahi DPRD".

Spanduk tersebut merupakan perbuatan yang sangat arogan dan sama sekali tidak mendidik. "Kami anggota DPRD siap menerima masukan dan kritikan yang

## Sesalkan Demo Solmadapar Tak Beretika

konstruktif, tetapi yang membangun dengan cara yang santun. Bukan seperti demo Solmadapar yang sama sekali tidak mendidik," ungkapnya kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (7/10).

Krisantus juga mengingatkan aksi mahasiswa yang jangan menggunakan ala preman diatas kepentingan masyarakat banyal. Menurut legislator Sanggau ini, jika memang terbukti ada mafia anggaran seperti yang dituduhkan para mahasiswa tersebut, silahkan dibuktikan dan silahkan dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diselesaikan secara hukum. "Silahkan buktikan, siapa orangnya dan jangan asal tuduh. Spanduk itu sangat mendeskreditkan Gubernur," sesal Krisantus yang juga legislator PDIP Kalbar.

Sementara itu, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Ary Pudyanti, SE, ini juga mengaku kecewa dengan demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang dilakukan beberapa hari lalu. Menurut legislator Kubu Raya ini, mahasiswa tersebut tidak mengerti apa yang mereka perjuangkan dengan menuduh mafia anggaran yang terjadi di DPR RI juga sama

dengan DPRD Kalbar.

"Jangan samakan DPR-RI dengan DPRD Kalbar, setau saya disini tidak ada mafia anggaran, kalau ada tunjukkan buktikan. Nanti sama-sama kita selesaikan melalui pihak berwajib," kata ibu dua anak ini.

Sebelumnya saat Paripurna pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar terhadap perubahan APBD 2010 berlangsung, aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa Solmadapar menuntut penegak hukum membongkar mafia anggaran di provinsi itu dilakukan.

Aksi para mahasiswa itu menyusul temuan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap kerugian keuangan pada Pemprov Kalbar sebesar Rp 156 miliar dan temuan nilai aset yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Bahkan aksi mahasiswa tersebut sempat terjadi keributan antara legislator Kalbar, Martinus Sudarno yang pada saat demo berlangsung, menerima dan mendengarkan tuntutan mahasiswa tersebut.

Isi pernyataan sikap itu juga mengkritisi kinerja BPK RI Perwakilan Kalbar serta aparat penegak hukum. BPK dinilai

lamban dalam mengaudit APBD 2010 dan Solmadapar meminta agar BPK secepatnya memublikasikan setiap hasil temuan yang janggal dan berindikasi merugikan keuangan daerah.

Solmadapar juga mengkritisi penggunaan anggaran kedatangan Presiden RI di Kalbar tahun ini. Mereka menuntut transparansi penggunaan anggaran tersebut.

Solmadapar juga mendesak DPRD Kalbar melalui Pansus, pihak kepolisian dan Kejati untuk segera menindaklanjuti temuan dan persoalan yang ada. Orang nomor satu di Bumi Khatulistiwa itu juga didesak memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan diproses secara hukum terhadap mafia anggaran yang telah terbukti secara hukum melakukan tindakan melawan hukum.

Kemudian Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PDI Perjuangan, Martinus Sudarno menyangkan tulisan yang tertera di spanduk yang dibawa para mahasiswa itu dalam melakukan aksinya. "Mereka tidak beretika, tidak intelek. Kita mengecam aksi yang tidak beretika itu," tegasnya Sudarno. (aca)